

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam rangka meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan mutu pendidikan dimaksudkan agar pendidikan dapat mengikuti dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang begitu cepat serta kemajuan pembangunan yang semakin meningkat memerlukan dukungan sumberdaya manusia yang bermutu dengan tidak meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya nasional. Pernyataan ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Bab I Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (USPNS No 20 Tahun 2003). Adapun manusia bermutu dalam konteks pendidikan nasional tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.(USPNS No. 20 Tahun 2003). Upaya untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah dilakukan melalui pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap Bangsa Indonesia. (USPN No. 20 Tahun 2003 Bab 3 pasal 4 ayat 5).

Jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga jalur, hal ini tercantum dalam USPN No 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Selanjutnya pada pasal 12 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah, menyatakan bahwa : Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembagakan ataupun tidak. Tujuan Pendidikan luar sekolah antara lain :

1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin sepanjang hayatnya

2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Sebagai ilustrasi tentang perkembangan penuntasan buta huruf di Indonesia, pada tahun 1971 jumlah penduduk yang masih buta huruf tercatat sebanyak 31.464.860 orang dan selama digarap melalui program paket A, maka pada tahun 1980 tersisa 30.096.559 orang. Pada tahun 1990 jumlah penduduk buta huruf usia sepuluh tahun ke atas 21.494.117 orang (Sumber : Hasil SP 1971, 1980 dan 1990 BPS Jakarta)

Berdasarkan data di atas nampak jelas bahwa angka buta huruf pada sepuluh tahun terakhir penurunannya kecil sekali. Hal ini disebabkan : Adanya penambahan jumlah penduduk yang buta huruf, kondisi geografi yang kurang mendukung, akibat kurangnya pembinaan, warga belajar yang sudah mengikuti program, menjadi buta huruf kembali, proses pembelajaran yang masih rendah. Oleh karena itu pemerintah melalui program Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 bertekad untuk menurunkan prosentase buta aksara dari 10,2 % menurut Sensus Nasional BPS tahun 2003, menjadi 5 % pada akhir tahun 2009. Oleh karena itu pemerintah memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Komitmen tersebut diimbangi dengan Inpres nomor 5 tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Salah satu layanan pemerintah pada jalur pendidikan non formal adalah dengan mengembangkan program kesetaraan. Makna setara artinya sepadan dalam hal nilai, pengaruh atau pengakuan *civil effect* lulusannya. Proses pembelajarannya harus dapat menjamin agar lulusannya memiliki kemampuan, kecakapan dan nilai-nilai yang berguna dalam menempuh kehidupan. Makna kesetaraan adalah kesamaan standar kompetensi lulusan yang harus dicapai dengan sekolah formal, tetapi cara pencapaiannya berbeda sehingga diberi catatan khusus

Pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan non formal untuk pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan kesetaraan meliputi Program Paket A, setara SD / MI, Program Paket B setara SMP/ Mts. Dan Paket C setara SMA/ MA. Khusus program Paket A dan Paket B, program ini dilaksanakan untuk mendorong wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Secara umum pendidikan kesetaraan dikhususkan bagi : anak putus sekolah, mereka yang belum / tidak terlayani pendidikan dasar formal karena berbagai hambatan, mereka yang menentukan pendidikan kesetaraan atas keinginan sendiri. Dengan demikian pendidikan berfungsi sebagai pendidikan pengganti, penambah atau pelengkap.bagi dirinya.

Pendidikan kesetaraan berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, kemudian diperjelas lagi pada pasal 31 ayat 1 dan pasal 28 C ayat 1 dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara secara adil dan merata untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagai salah satu kebutuhan dasarnya dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Program Pendidikan Kesetaraan melaksanakan amanat UU No 20 / 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 13 ayat 1 tentang jalur pendidikan dan pasal 26 ayat 1 bahwa “Hasil pendidikan formal dapat dihargai dengan hasil program pendidikan formal selanjutnya

berdasarkan Kepmen nomor 0131/U/ 1994 tentang program Paket A dan Paket B dan Kepmen nomor 132/U/2004 tentang Paket C, pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pembelajaran bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan melalui pendidikan kesetaraan dan pengakuan setara dengan tamatan SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA”

Dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur pendidikan Nonformal salah satunya adalah dengan mengembangkan Program Pendidikan Paket B, yaitu program pendidikan yang memberikan pendidikan setara SMP bagi tamatan Paket A atau yang sederajat dengan SD / MI, serta siswa putus SMP / Mts agar dapat memiliki pengetahuan akademik dan penguasaan keterampilan praktis yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha. (Pamplet Program Paket B Setara SMP Subdin Kegiatan Peningkatan PLS dan Mutu PKBM Prop Jabar Tahun 2006) bertujuan :

1. Mengembangkan dasar-dasar pembentukan warga negara yang beriman dan bertaqwa berakhlak dan bermartabat
2. Meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung sebagai alat untuk memahami mata pelajaran lainnya
3. Meningkatkan pengalaman belajar yang mandiri, kreatif dan produktif
4. Memberikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berusaha mandiri
5. Memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan berusaha mandiri
6. Memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan sikap dasar yang memungkinkan peserta didik mengikuti pendidikan lanjutan di SMA / SMK / MA atau Paket C.

Bila kita lihat tujuan dari program paket B ini maka orientasi tujuan programnya lebih menekankan pada sektor keterampilan siap pakai bagi para warga belajarnya. Adapun fungsinya adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SMP kepada peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat bersekolah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi di SMP bagi kelompok usia 13 -15 tahun dan memberikan akses terhadap pendidikan setara bagi orang dewasa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2006 penduduk Jawa Barat yang berusia 15 ke atas masih terdapat 1.512.899 orang penduduk yang buta aksara. Untuk wilayah Kabupaten Bandung menurut sensus BPS tahun 2006 data buta aksara usia 15 tahun ke atas berjumlah 36.812 orang. Khusus di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung menurut data dari BPS Kabupaten pada tahun 2006 usia 15 ke atas berjumlah 1462 orang. Ini merupakan tantangan berat bagi propinsi Jawa Barat yang mempunyai program “ Jawa Barat merupakan propinsi terdepan di antara propinsi-propinsi lain di Indonesia pada tahun 2010”.

Pelaksanaan Program Paket B di Kecamatan Cipatat sudah berjalan beberapa angkatan sampai sekarang. Program ini merupakan salah satu jawaban dalam rangka pemberantasan buta huruf sekaligus dalam upaya pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, di mana pada tahun 2010 semua penduduk Jawa Barat sudah melek huruf dan mengenyam pendidikan selama sembilan tahun. Program ini diharapkan tingkat pendidikan masyarakat Jawa Barat menjadi meningkat

Namun data di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Paket B di Wilayah Kecamatan Cipatat ini kurang lancar, hal ini terbukti dengan melihat data kehadiran warga belajar yang rata-ratanya mencapai 70 % (Arsip Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cipatat Tahun 2007). Selain itu data kelulusan dari tiga tahun ke belakang menunjukkan antara lain :

Tahun Pelajaran	Jumlah Warga		
	Belajar	Lulus	Tidak Lulus
2004 / 2005	45	26	19
2005 / 2006	39	27	12
2006 / 2007	69	48	21

Sumber data : Arsip Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cipatat 2007

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan data-data di lapangan (Arsip Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cipatat) bahwa Program Paket B di Kecamatan Cipatat ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu

Kondisi Tutor

1. Terbatasnya jumlah tutor

Berdasarkan data Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cipatat tahun 2007 jumlah warga belajar ada 433 anak yang tersebar di 4 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sedangkan jumlah tutor hanya 12 orang, hal tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah guru SMP pada pendidikan formal. Dengan demikian seorang tutor harus mampu melayani warga belajar sebanyak 36 anak, apalagi tiap tutor rata-rata memegang 2 mata pelajaran, sehingga jumlah tutor masih kurang. Perekrutan tenaga tutor juga menjadi kendala tersendiri, karena untuk pengangkatan tenaga tutor tidak seperti pengangkatan guru-guru lainnya.

1. Kualitas kemampuan tutor dalam Proses Belajar Mengajar masih rendah

Indikasi dari kemampuan tutor ini terlihat dari aspek pembuatan administrasi yang harus dibuat oleh tutor. Hampir semua tutor tidak membuat administrasi, alasannya karena tidak mampu membuat administrasinya. Indikasi yang kedua para tutor pada waktu mengajar tidak menggunakan alat peraga mengajar, di mana kita mafhum bahwa alat peraga merupakan media mengajar untuk menghindari verbalisme. Indikasi yang ketiga, pengangkatan tenaga tutor tidak melalui seleksi kualitas yang ketat, yang penting mereka mau mengajar, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Orang yang menjadi tutor itu adalah benar-benar orang yang bekerja secara

ikhlas, sehingga orang yang menjadi tutor itu bebas, tetapi dampak negatifnya tidak memikirkan kualitas, yang penting dia mau ikut membantu kegiatan proses belajar mengajar

2. Domisili tutor dengan tempat belajar yang cukup jauh

Kendala selanjutnya adalah masalah domisili tutor, antara rumah tutor dengan tempat belajar warga belajar cukup jauh. Tempat belajar warga belajar itu berada di kampung A, sedangkan para tutornya berada di kampung B, di mana letak kampung A dengan kampung B berjauhan.

3. Kurangnya sarana transportasi ke tempat belajar warga belajar

Untuk mencapai tempat belajar warga belajar itu sulit terjangkau oleh kendaraan roda empat, kalau pun ada hanya kendaraan ojek, sehingga kondisi seperti ini menjadikan kendala tersendiri, baik bagi tutor maupun bagi warga belajar. Hal inilah merupakan kendala bagi orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya ke sekolah formal. Untuk itu sebagai alternatif maka orang tua memasukan sekolah anaknya ke Program Pendidikan Paket B.

4. Jumlah honor yang diterima tutor sangat kecil / di bawah standar

Jika tutor tersebut masuk ke Program paket B yang dibiayai pemerintah, maka ia akan menerima honor dari pemerintah. Jumlah honor yang diterima para tutor itu sangat jauh dari standar upah minimal dan itupun kadang-kadang telat menerima honorinya. Tetapi yang lebih

prihatin lagi adalah para tutor yang mengajar pada Program paket B yang bersifat swadaya. Honorinya walaupun ada, selain kecil juga tidak menentu.

Kondisi Warga Belajar

Tingkat kepedulian warga belajar untuk belajar pada program paket B sangat rendah, hal ini disebabkan :

1. Domisili rumah dengan tempat belajar yang cukup jauh

Warga belajar tersebar dari berbagai pelosok desa kemudian dipusatkan di suatu daerah. Letak rumah warga belajar dengan lokasi tempat belajar berjauhan, sehingga mereka sering kesiangan Hal ini mengakibatkan terhambatnya waktu belajar.

2. Kondisi ekonomi orang tua termasuk ekonomi lemah

Kondisi orangtua warga belajar tergolong pada ekonomi lemah, orangtuanya para pekerja buruh kasar, petani penggarap bahkan dari keluarga tidak mampu yang sangat sulit untuk mencari sumber kehidupan yang mapan.

3. Banyak dimanfaatkan oleh orang tua untuk bekerja

Ada orangtua yang memaksakan anaknya untuk menjadi pekerja kasar, membatu orangtuanya, padahal usia dia adalah usia-usia sekolah, tetapi karena berbagai alasan orangtua selalu memanfaatkan anak-anaknya untuk bekerja. Akibatnya anak yang seharusnya pada waktu itu belajar, sekarang tidak ada, karena sedang membantu orangtuanya.

4. Rasa rendah diri para warga belajar

Tidak kalah pentingnya yang menjadi penghambat program paket B adalah adanya rasa rendah diri yang cukup tinggi di kalangan warga belajar. Berdasarkan hasil pengamatan para penilik di lapangan, mereka malu belajar di program paket B, alasannya karena belajar di program paket B tidak seperti di pendidikan formal yang serba terstruktur formal dalam berbagi kegiatannya, baik dari segi pakaian, usia maupun lama belajarnya perminggu.

Bahan Ajar

Bahan ajar berupa modul, buku paket maupun kurikulum untuk program paket B belum ada. Hal ini menjadi kendala bagi para tutor untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajarnya.

Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana belajar sangat terbatas bahkan beberapa komponen seperti alat peraga dan sarana olah raga tidak ada.
2. Kondisi bangunan masih menumpang pada beberapa sekolah pemerintah / gedung kantor desa., walaupun ada beberapa Program Paket B yang belajar dengan memanfaatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pengakuan Masyarakat

1. Kurangnya perhatian dari masyarakat serta instansi terkait terhadap program paket B. yang mengakibatkan perkembangan program paket B kurang berkembang seperti pendidikan formal.
2. Masih ada anggapan bahwa Paket B tidak sama dengan sekolah SMP formal, sehingga orangtua enggan untuk memasukkan anaknya ke program paket B. Hal ini mengakibatkan jumlah warga belajar selalu sedikit.

C. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka salah satu kendala tidak berhasilnya Program Paket B setara SMP di Kecamatan Cipatat khususnya di PKBM Citatah Endah di bawah naungan Yayasan Bina Insan Mandiri Desa Citatah Kecamatan Cipatat adalah perilaku warga belajarnya sendiri yang mengalami kesulitan dalam belajar.

Menurut Muhibbin Syah (2006: 182) secara garis besar faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar itu terdiri dari dua macam, yakni :

1. Faktor intern siswa. yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri.
2. Faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa.

Hal senada diungkapkan oleh Otong Kardisaputra (2000 : 60) yang menjelaskan bahwa : Terdapat masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam belajar yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berada pada diri siswa (warga belajar) yaitu antara lain : motivasi, kemampuan, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer.

Sementara Wina Sanjaya (2006 : 43) menjelaskan bahwa :

Tidak adanya atau kurangnya perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang sedang dibahas merupakan salah satu perilaku siswa yang bisa mengganggu iklim belajar. Perilaku siswa (warga belajar) tersebut biasanya ditunjukkan oleh tindakan-tindakan tertentu, misalnya mengobrol ketika guru sedang menjelaskan atau melakukan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan materi pelajaran seperti membaca buku majalah, malah sering ditemukan ada siswa yang sengaja menggambar wajah guru yang sedang mengajar.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan dibahas adalah : Kendala-kendala apa yang dominan dihadapi warga belajar Program Paket B Setara SMP di PKMB Citatah Endah Desa Citatah Kecamatan Cipatat dalam belajar ? Untuk membatasi persoalan di atas maka penelitian akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Kendala-kendala apa yang dihadapi warga belajar dalam belajar di lingkungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi warga belajar dalam belajar di lingkungan keluarga ?
- c. Kendala-kendala apa yang dihadapi warga belajar dalam belajar di lingkungan masyarakat ?

D. PENJELASAN ISTILAH

1. Kendala adalah hambatan atau rintangan yang menghalangi suatu kegiatan (Kamus Umum B. Indonesia : 2005)
Kendala-kendala belajar artinya hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi warga belajar pada waktu belajar. (Otong Kardisaputra: 2000 : 59)
2. Warga belajar adalah sebutan bagi peserta didik pada pendidikan non formal. Tutor adalah sebutan bagi tenaga pendidik/ guru pada pendidikan non formal. (Pamphlet Program Paket B 2007)
3. Pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan non formal untuk pendidikan dasar dan menengah, Pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A setara SD / MI, Paket B Setara SMP / Mts dan Paket C setara SMA / MA (Direktori PKBM Prop. Jabar Subdin PLS : 50 : 2006)
4. Program Pendidikan Paket B adalah program pendidikan yang memberikan pendidikan setara SMP bagi tamatan Paket A atau yang sederajat SD/ MI, serta siswa putus SMP/

Mts agar dapat memiliki pengetahuan akademik dan penguasaan keterampilan praktis yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja atau berusaha. (Pamphlet Program Paket B 2007)

Program Pendidikan Paket B Setara SMP di PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri Kecamatan Cipatat adalah Salah satu program pendidikan setara SMP yang diselenggarakan di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung yang sedang digalakkan di kecamatan ini.. (Arsip Data 2007 Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cipatat)

D. TUJUAN PENELITIAN

Agar lebih terarah dalam penelitian ini, perlu dijelaskan tujuannya, di mana tujuannya terbagi dua, yaitu :

- a. Tujuan Umum : Ditemukannya kendala-kendala belajar yang dominan dihadapi warga belajar pada Program Paket B Setara SMP di PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri Kecamatan Cipatat
- b. Tujuan Khusus :
 1. menemukan kendala-kendala belajar yang dominan dihadapi warga belajar program paket B Setara SMP di PKBM Yayasan Insan Mandiri Kecamatan Cipatat yang berada di lingkungan rumah
 2. menemukan kendala-kendala belajar yang dominan dihadapi warga belajar program paket B Setara SMP di PKBM Yayasan Insan Mandiri Kecamatan Cipatat yang berada di lingkungan Kelas dan Sekolah

3. menemukan kendala-kendala belajar yang dominan dihadapi warga belajar program paket B Setara SMP di PKBM Yayasan Insan Mandiri Kecamatan Cipatat yang berada di lingkungan masyarakat.

F. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan terdapat dua manfaat yang bisa diambil, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengelola dan penyelenggara program pendidikan Paket B setara SMP pada PKBM Citatah Endah di bawah naungan Yayasan Bina Insan Mandiri khususnya dan Program Paket B Setara SMP di Kecamatan Cipatat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Tutor.

Tutor merupakan ujung tombak dalam proses belajar mengajar pada program paket B setara SMP. Oleh karena itu perlu ada pedoman bagi tutor dalam melaksanakan Program Paket B Setara SMP bagi para tutor dalam meningkatkan layanan proses belajar mengajar. Pedoman itu bisa terwujud dari hasil penelitian ini.

Bagi Warga Belajar

Warga belajar merupakan subyek dalam program Paket B. Oleh karena itu mereka harus jadi pelaku dalam kegiatan di program paket B. Segala kendala yang dihadapi Warga Belajar harus tahu dan pada akhirnya dapat dipecahkan. Hal ini bisa terjadi apabila terdapat suatu hasil penelitian yang akurat seperti penelitian diatas.

Bagi Penyelenggara

Pertama : Sebagai dokumen operasional yang dapat membantu penyelenggara dalam memberikan layanan pendidikan Program Paket B setara SMP bagi warga belajar dan dapat dikembangkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. (PKBM) untuk meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan.

Kedua : Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Paket B setara SMP di PKBM Citatah Endah, sehingga kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dapat diperbaiki untuk menyelenggarakan program yang akan datang.

Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu sosial kontrol untuk menguji keberhasilan program paket B. Mereka harus berperan aktif dalam memajukan program kesetaraan, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.. Kalau terdapat kendala-kendala belajar menimpa warga belajar, ini akan merugikan masyarakat, karena produk yang dihasilkan dari PKBM ini tidak bisa diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat membantu memberikan motivasi belajar dan ikut memecahkan kendala-kendala yang dihadapi warga belajar.

Bagi Dinas Pendidikan

Berbagai program unggulan yang digulirkan dari Dinas Pendidikan untuk kepentingan masyarakat, bila tidak direspon oleh berbagai pihak, termasuk para penyelenggara Program Pendidikan Paket B, maka program itu tidak akan berjalan. Dengan demikian diperlukan penelitian yang tepat dan bermanfaat.

Dengan adanya hasil penelitian ini, pihak dinas pendidikan dapat memanfaatkannya untuk mengevaluasi sejauh mana program PKBM ini berhasil atau tidaknya dalam menyelenggarakan program.

